

ABSTRAK

Perubahan iklim, erosi, dan akresi merupakan peristiwa alami yang terjadi secara evolusi sehingga proses terjadinya memerlukan jangka waktu yang lama. Dampak dari fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran *baseline* negara mengikuti kondisi geografis yang terdampak sehingga terjadi perubahan wilayah negara atas laut. Hukum laut belum mengatur mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran *baseline* akibat fenomena alam sehingga merupakan suatu kekosongan hukum yang dapat menjadi potensi sengketa antar negara. Penelitian ini mengkaji atas dampak dan pengaturan yang dapat menjadi landasan apabila terjadi perubahan *baseline* negara akibat fenomena alam, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Negara memiliki diskresi untuk menetapkan koordinat serta peta geografisnya, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara wajib melakukan deposit peta resmi ke Sekretaris Jenderal PBB. *Baseline* yang telah didepositkan merupakan *baseline* yang tetap selama negara tidak melakukan pembaharuan.

Kata Kunci: *Baseline*, Perubahan Iklim, Erosi, Akresi, Hukum Laut

ABSTRACT

Climate change, erosion, and accretion are natural phenomenon that occur through an evolutionary process. The impact of such natural phenomena is expected to shift the state's baseline following the geographical condition, consequently, it will also change the maritime zone owned by the state. The Law of the Sea has not regulated such impacts of the shifting baselines caused by natural phenomena which indicates a legal vacuum on this matter. This legal research examines the regulations and its implications which can be the basis of shifting baselines coverage due to natural phenomena, the approach of this research is through statute approach and conceptual approach. States have the discretion to establish their coordinates point and geographical maps, moreover, based on the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS 1982), States are required to make official map deposits to the United Nations Secretary-General. The deposited baseline is permanent as long as the state does not make any updates.

Keyword: Baseline, Climate Change, Erosion, Accretion, Law of The Sea.